

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badudu, Yus dan M. Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Bahreisj, Hussein. *Himpunan Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2011.
- Driyarkara. *Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Nusantara, 1980.
- Haryanti, Amelia. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hutabarat, Martin H. *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ishaq, Isjoni. *Membangun Visi Bersama "Aspek-Aspek Penting dalam Reformasi Pendidikan"*. Jakarta: Yayasan Obor Nusantara, 2006.
- Jalal, Fasli. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Kaho, Josep Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lubis, M. Solly. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumni, 1983.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapa, 1994.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Patarai, Muhammad Idris. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*. Makasar: De La Macca, 2015.
- Riawan. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ridwan H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Djembatan, tt.

Sirozi, M. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press, 1980.

Suryadi, Budi. *Sosiologi Ekonomi & Komunikasi Masa*. Jakarta: Scripta Cendikia, 1982.

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.

Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

JURNAL

Alawiyah, Rafida. "Peran Dinas Pendidikan dalam Wajib Belajar di Tinjau Menurut Fiqh Siyasah", *Jurnal EL-THAWALIB*, 3(5) (Oktober, 2022): 799-810.

Aritonang, Dinoroy Marganda. "Pola Distribusi Urusan Pemerintah Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1) (Maret, 2016): 41-52.

Djambar, dkk. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 2 (Februari, 2017): 26-35.

Haba, Muhammad Ramli. "Reformasi Pendidikan dalam Perspektif Pemerintahan Daerah", *Jurisprudentie*, 7(1) Juni 2020): 102-115.

Habibi, Fikri. "Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten", *Jurnal Sawala*, 5(2) (Oktober, 2017): 11-22.

Harahap, Risalan Basri. "Analisis Terhadap Putusan MK Tentang Status Anak", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(2) (2015): 23.

Margiyant, Iis dan Maulia, Siti Tiara. "Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun", *Jupensi*, 3(1) (2023): 199-108.

- Morangki, Albert. "Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertanahan", 20(3) (April-Juni, 2012): 61-78.
- Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Maret, 2014): 69-79.
- Rosadi, Ootong. "Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3) (2015): 541-561.
- Safira, Levana, dkk. "Aspek Hukum Wajib Belajar sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2) (Maret, 2019); 159-175.
- Siswanto, Agus. "Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bantul", *Jurnal Hanata Widya*, 6(7), (2017): 55-65.
- Sodikin. "Batas Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah". *'Adliya*, 13(2) (Juni 2019): 209-228.
- Uluputty, Irfan. "Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum", *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2018): 37-57.

SKRIPSI

- Almubarak, Ilham Arif. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara, 2020.
- Nurjanah, Fatwa. "Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Petir Kabupaten Serang". *Skripsi*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018.

DISERTASI

- Manan, Bagir. "Hubungan Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945". *Disertasi*, Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, 1990.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Tenaga Pendidik

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Perubahan Tahun 2019-2024

INTERNET

<https://setda.cirebonkab.go.id/letak-geografis> (Diakses Pada 9 November 2023, Pukul 14.56)

